

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perusahaan merupakan suatu organisasi yang terdiri dari atas kelompok orang yang bekerja untuk mencapai suatu tujuan. Kepentingan yang paling mendasar yaitu mendapatkan keuntungan serta kesejahteraan bagi para pemegang saham perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan yang tinggi merupakan tujuan jangka panjang yang seharusnya dicapai perusahaan, yang akan tercermin dari harga pasar sahamnya, karena penilaian investor terhadap perusahaan dapat diamati melalui pergerakan saham perusahaan.

Nilai perusahaan akan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan membayar deviden. Ada saatnya deviden tersebut tidak dibagikan oleh perusahaan karena perusahaan merasa perlu untuk menginvestasikan kembali laba yang diperolehnya. Besarnya deviden tersebut dapat mempengaruhi harga saham. Apabila deviden yang dibayar tinggi, maka harga saham cenderung tinggi sehingga nilai perusahaan juga tinggi dan jika deviden dibayarkan kepada pemegang saham kecil maka harga saham perusahaan yang membagikannya tersebut juga rendah. Kemampuan sebuah perusahaan membayar deviden erat hubungannya dengan kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tinggi, maka kemampuan perusahaan akan membayar

dividen juga tinggi. Dengan dividen yang besar akan meningkatkan nilai perusahaan (Harjito dan Martono, 2005).

Nilai perusahaan sangat dibutuhkan, karena dengan peningkatan nilai perusahaan diharapkan mampu menarik pemegang saham untuk selalu berinvestasi pada perusahaan. Dengan peningkatan nilai perusahaan akan berpengaruh juga terhadap kesejahteraan karyawan, oleh sebab itu pihak yang ada di perusahaan dituntut untuk memanfaatkan kemampuan yang dimiliki semaksimal mungkin agar perusahaan lebih unggul dalam bersaing dibanding perusahaan lain.

Perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham ini mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut *agency conflict*. Hal tersebut terjadi karena manajer mengutamakan kepentingan pribadi, sebaliknya pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi dari manajer karena apa yang dilakukan manajer tersebut akan menambah biaya bagi perusahaan sehingga menyebabkan penurunan keuntungan perusahaan dan berpengaruh terhadap harga saham sehingga menurunkan nilai perusahaan.

Adanya *agency problem* tersebut akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan keuangan perusahaan, yaitu meningkatkan nilai perusahaan dengan cara memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Hal ini membutuhkan kontrol dari pihak luar dimana peran *monitoring* dan pengawasan yang baik akan mengarahkan tujuan sebagaimana mestinya (Laila, 2011).

Peningkatan nilai perusahaan bisa dicapai apabila manajemen perusahaan mampu menjalin kerja sama yang baik dengan pihak lain di dalam membuat keputusan-keputusan keuangan. Pihak lain tersebut diantaranya meliputi *shareholder* dan *stakeholder*. Apabila tindakan yang dilakukan manajer dan pihak lain tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka permasalahan tidak akan terjadi diantara kedua belah pihak tersebut. Akan tetapi kondisi yang sesungguhnya, penyatuan kepentingan antara kedua belah pihak tersebut sering kali menemui masalah (Borolla, 2011). Adanya masalah diantara manajer dan pemegang saham disebut masalah agensi.

Krisis yang melanda Indonesia yang dimulai pada pertengahan 1997 salah satunya diakibatkan rendahnya penerepan *corporate governance*. Hal ini ditandai dengan kurang transparannya pengelolaan perusahaan sehingga kontrol publik menjadi sangat lemah dan terkonsentrasinya pemegang saham besar pada beberapa keluarga menyebabkan campur tangan pemegang saham mayoritas pada manajemen perusahaan sangat terasa dan menimbulkan konflik kepentingan yang sangat menyimpang dari norma tata kelola perusahaan yang baik.

Hadirnya *corporate governance* dalam pemulihan krisis di Indonesia menjadi mutlak diperlukan, mengingat *good corporate governance* mensyaratkan suatu pengelolaan yang baik dalam sebuah organisasi (Hastuti, 2005). FCGI merumuskan tujuan dari *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). *Corporate governance* yang mengandung empat unsur

penting yaitu keadilan, transparansi, pertanggungjawaban dan akuntabilitas, diharapkan dapat menjadi suatu jalan dalam mengurangi konflik keagenan. Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik, diharapkan nilai perusahaan akan dinilai dengan baik oleh investor.

Good corporate governance merupakan suatu sistem yang mengatur bagaimana organisasi dioperasikan dan dikontrol dengan baik. Prinsip-prinsip dasar dari *good corporate governance* tersebut pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan. *Good corporate governance* lebih condong pada serangkaian pola perilaku perusahaan yang diukur melalui kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan, perlakuan terhadap para pemegang saham. Sehingga dapat dijadikan sebagai dasar analisis dalam mengkaji *good corporate governance* di suatu negara dengan memenuhi transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan yang sistematis dan dapat digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja perusahaan (Surya, 2008). Dengan adanya peningkatan kinerja perusahaan, maka nilai perusahaan juga akan semakin baik.

Salah satu mekanisme yang diharapkan dapat mengontrol biaya keagenan yaitu dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) *good corporate governance* adalah salah satu pilar sistem ekonomi pasar. *Corporate governance* berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di

suat negara. Kaen (2003) menyatakan *corporate governance* pada dasarnya menyangkut masalah siapa (*who*) yang seharusnya mengendalikan jalannya kegiatan korporasi dan mengapa (*why*) harus dilakukan pengendalian terhadap jalannya kegiatan korporasi. Yang dimaksud dengan siapa adalah para pemegang saham, sedangkan “mengapa” adalah karena adanya hubungan antara pemegang saham dengan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan.

Menurut konsep GCG, perusahaan akan memperoleh nilai perusahaan (*value of the firm*) yang maksimal apabila fungsi dan tugas masing-masing pelaku organisasi bisnis yang modern dapat dipisahkan dengan membentuk *Board of Directors* dan *Board of Commissioner*. Indonesia mengenal sistem *two board system* (Dewan Komisaris dan Direksi) dimana fungsi untuk menjalankan perusahaan dipegang oleh dewan direksi terpisah dari fungsi pengawasan yang dijalankan oleh dewan komisaris.

Ada empat mekanisme *corporate governance* yang sering dipakai dalam berbagai penelitian mengenai *corporate governance* yang bertujuan untuk mengurangi konflik keagenan, yaitu komite audit, komisaris independen, kempelikan institusional, kepemilikan manajemen (Rahmawati, 2007).

Kepemilikan manajerial dimaksudkan untuk memberikan kesempatan manajer terlibat dalam kepemilikan saham sehingga dengan keterlibatan kedudukan manajer sejajar dengan pemilik perusahaan (pemegang saham). Dengan adanya kepemilikan saham yang besar oleh

manajemen dapat mensejajarkan kepentingan manajer dan pemegang saham sehingga dapat mengurangi konflik keagenan, karena manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab meningkatkan kemakmuran pemilik atau pemegang saham (prinsipal) sehingga nilai perusahaan juga akan meningkat.

Yadyana dan Wati (2011) menjelaskan, kepemilikan saham oleh pihak manajemen pada dasarnya adalah satu upaya untuk mensejajarkan antara kepentingan manajemen tersebut dengan kepentingan para pemegang saham. Wahidalwati (2002) menyebutkan, dengan terwujudnya kesejajaran kepentingan antara dua belah pihak, maka pihak manajemen akan bisa merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil secara benar dan merasakan kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Yadyana dan Wati (2011) juga menambahkan, ketika kondisi yang demikian tersebut terwujud maka manajemen akan termotivasi untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Kepemilikan institusional atau kepemilikan saham oleh investor yang berasal dari pihak luar perusahaan, seperti berasal dari sektor keuangan perusahaan efek, perusahaan asuransi, perbankan, perusahaan investasi, dan dana pensiun (Aminudin, 2004). Dengan adanya kepemilikan saham yang besar oleh institusi maka akan mendorong peningkatan pengawasan (*monitoring*) yang lebih optimal dan efektif terhadap kinerja manajemen, sehingga dapat meminimalisasi konflik keagenan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan (Haruman, 2007). Haruman (2008) menyatakan bahwa

struktur kepemilikan perusahaan dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Struktur kepemilikan akan mempengaruhi keputusan keuangan yang terdiri dari keputusan investasi, pendanaan dan kebijakan deviden yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai perusahaan.

Struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional) oleh beberapa peneliti dipercaya mampu memengaruhi jalannya perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Hal ini disebabkan karena adanya kontrol yang mereka miliki (Wahyudi dan Prawesti, 2006)

Struktur kepemilikan publik dan masalah keagenan merupakan isu sentral dalam literatur keuangan. Semakin besar dan luas usaha suatu perusahaan, pemilik tidak bisa mengelola sendiri perusahaannya secara langsung sehingga memicu timbulnya masalah keagenan. Dalam kaitannya dengan kepemilikan terdapat dua masalah keagenan, yaitu masalah keagenan antara manajemen dan pemegang saham dan masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Masalah keagenan pertama terjadi apabila kepemilikan saham tersebar, sehingga pemegang saham secara individual tidak dapat mengendalikan manajemen. Akibatnya perusahaan bisa dijalankan sesuai keinginan manajemen itu sendiri. Masalah keagenan kedua terjadi jika terdapat pemegang saham mayoritas, sehingga terdapat pemegang saham mayoritas yang dapat

mengendalikan manajemen atau bahkan menjadi bagian dari manajemen itu sendiri.

Akibatnya pemegang saham mayoritas memiliki kendali mutlak dibanding pemegang saham minoritas, sehingga pemegang saham mayoritas bisa melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya, tetapi kemungkinan merugikan pemegang saham minoritas (La Porta *et al.* 1999). Konsentrasi kepemilikan bisa memicu terjadinya resiko ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas. Ekspropriasi adalah proses penggunaan kontrol untuk memaksimalkan kesejahteraan sendiri dengan distribusi kekayaan dari pihak lain (Claessens *et al.* 2000b).

Dewan komisaris memiliki tanggungjawab dan mempunyai wewenang, mensupervisi kebijakan dan tindakan Direksi, dan memberikan nasihat kepada Direksi bila diperlukan. Untuk melakukan hal tersebut, dewan komisaris dapat berdasarkan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan, atau meminta nasihat profesional yang independen dan/atau menetapkan panitia khusus (Tunggal, 2011: 37).

Dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *good corporate governance*. Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan (FCGI, 2001). Komposisi dewan komisaris merupakan salah satu karakteristik dewan yang berhubungan dengan kandungan informasi laba. Melalui perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi

pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas (Budiono, 2005). Hal ini diperkuat oleh pendapat Allen dan Gale (2000) yang menegaskan bahwa dewan komisaris merupakan mekanisme *governance* yang penting.

Fungsi kontrol yang dilakukan oleh dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk mengontrol perilaku oportunistik manajemen sehingga dapat membantu menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajer (Jensen, 1993). Dalam penelitian ini ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris. Dalam konsep *good corporate governance*, struktur fungsi dan tugas masing-masing pelaku organisasi bisnis modern akan mempengaruhi nilai perusahaan (*value of the firm*). Thjen *et al.* (2012) menjelaskan bahwa saat fungsi dan tugas tersebut dipisah dalam bentuk *Board of Director* dan *Board of Commisioner*, maka nilai perusahaan akan menjadi maksimal.

Lemahnya penerapan *good corporate governance* menyebabkan terjadinya beberapa kasus manipulasi akuntansi. Skandal manipulasi akuntansi ini melibatkan beberapa perusahaan besar di Indonesia seperti kasus manipulasi laporan keuangan pernah terjadi di PT. Great River International Tbk, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri garmen. Berdasarkan hasil penyidikan Badan Pengawasan Pasar Modal, Bapepam menemukan kelebihan pencatatan atau *overstatement* penyajian account penjualan dan piutang dalam laporan keuangan dan Penambahan aktiva tetap perseroan ratusan milyar. Akibat kejadian ini PT. Great River

International Tbk kesulitan arus kas sehingga tidak mampu membayar hutangnya sebesar Rp 250 milyar dan tidak mampu membayar obligasi sebesar Rp 400 milyar. Atas dasar hal tersebut pada tanggal 2 Mei 2007 Bursa Efek Jakarta memutuskan untuk menghapuskan pencatatan Efek PT Great River International Tbk.

Di Indonesia, industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Industri TPT juga penyumbang terbesar dalam perolehan devisa Indonesia. Pada tahun 2009, industri TPT berkontribusi 12,72% dalam perolehan devisa terhadap ekspor hasil industri. Globalisasi yang ditandai dengan berakhirnya sistem kuota 2005 yaitu ketentuan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) telah mendorong perdagangan TPT dunia semakin terbuka dan mengubah peta pasar dari sisi supply manajemen importir. Perubahan tersebut menimbulkan peluang dan ancaman bagi industri TPT Indonesia. Sementara persaingan di pasar dunia semakin meningkat, kondisi industri TPT di dalam negeri justru relatif memprihatinkan dan semakin lesu.

Dihentikannya program KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) ekspor TPT menjadi anjlok pada tahun 2012 dan 2013. Keadaan ini membuat perusahaan harus mengeluarkan *cost* yang lebih tinggi untuk impor bahan baku, karena kebanyakan perusahaan tekstil dan garment masih menggunakan bahan baku impor. Dari kejadian-kejadian tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut perusahaan sektor tekstil dan garment.

Beberapa hasil penelitian tentang GCG telah banyak dilakukan akan tetapi masih terdapat perbedaan hasil antara peneliti. Dalam penelitian Ria (2011) menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan sedangkan komisaris independen memiliki pengaruh. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Purwaningtyas (2011) menemukan hasil bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh.

Tolak ukur lain yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian dari penjualan investasi serta kemampuan perusahaan menghasilkan laba (*profit*) yang akan menjadi dasar pembagian deviden perusahaan. Rasio yang paling umum digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah ROA dan ROE. Keuntungan yang layak dibagikan kepada para pemegang saham adalah keuntungan setelah memenuhi seluruh kewajiban tetapnya yaitu beban bunga dan pajak. Oleh karena deviden diambil dari keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan, maka keuntungan tersebut akan mempengaruhi besarnya *dividen payout ratio*. Semakin besar keuntungan yang diperoleh, maka akan semakin besar pula kemampuan perusahaan membayar deviden.

Ulupui (2007: 15) menyatakan bahwa nilai perusahaan ditentukan oleh *earning power* dari aset perusahaan. Hasil positif menunjukkan bahwa semakin tinggi *earning power* maka semakin efisien perputaran aset dan semakin tinggi *profit margin* yang diperoleh perusahaan. Dan salah satu

alasan utama perusahaan beroperasi adalah menghasilkan laba yang bermanfaat bagi para pemegang saham. Ukuran dari keberhasilan pencapaian alasan ini adalah angka ROE yang berhasil dicapai. Semakin besar ROE mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi pemegang saham. Hal ini berdampak pada peningkatan nilai perusahaan.

Dewi dan Wirajaya (2013) menyimpulkan bahwa ROE berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sejalan dengan penelitian Wardoyo dan Veronica (2014) menemukan bahwa ROE memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil berbeda ditemukan Fahrizal (2013) yang menemukan ROE berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

Salah satu prinsip dasar yang dianut dalam akuntansi adalah prinsip prudent (*conservatism*). Lo (2015) mendefinisikan prudent sebagai akuntansi konservatif yang umumnya menyatakan bahwa akuntan harus melaporkan informasi akuntansi yang terendah di beberapa kemungkinan nilai untuk aktiva dan pendapatan, serta yang tertinggi dari beberapa kemungkinan nilai kewajiban dan beban.

Pengaruh prudent terhadap nilai perusahaan diduga diinteraksi variabel GCG. Komitmen pihak internal perusahaan dalam memberi informasi yang transparan, akurat dan tidak menyesatkan investor merupakan salah satu indikator dalam melihat tingkat prudent dalam pelaporan keuangan suatu perusahaan. Ini merupakan implementasi dari GCG harus dilakukan

oleh semua pihak dalam perusahaan terutama pada tingkat manajemen puncak yang telah menetapkan kebijakan perusahaan. Sebaliknya, dengan pengimplementasian *corporate governance* yang buruk akan memberikan keraguan bagi pemegang saham dan kreditur. Kepercayaan para pemilik modal akan menurun seiring kekhawatiran mereka akan besarnya resiko pada investasi (Sulistyanto dan Wibisono, 2003).

Sikap konservatif mengandung kesediaan mengorbankan sesuatu untuk mengurangi atau menghilangkan resiko terjelek dalam ketidak pastian (Suwardjono, 2013). Jika akuntansi menganut konsep dasar prudent dalam menyikapi ketidakpastian, maka akan diterapkan perlakuan atau prinsip akuntansi yang didasarkan pada munculan yang dianggap kurang menguntungkan. Tjhen, dkk (2012) menemukan prudent akuntansi mempengaruhi nilai perusahaan. Berbeda dengan Jusny (2014) menyatakan bahwa prudent akuntansi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Motivasi penelitian dalam penelitian ini yang pertama masih terdapat perbedaan hasil penelitian GCG, ROE dan prudent akuntansi terhadap nilai perusahaan. Kedua adalah isu GCG merupakan proses penting dalam mengelola kegiatan dalam perusahaan, dimana GCG mensyaratkan suatu pengelolaan yang baik dalam sebuah perusahaan. Berdasarkan fenomena mengenai GCG, profitabilitas dan prudent akuntansi pada perusahaan tekstil dan garment serta hasil penelitian yang masih berbeda-beda, sehingga perlu diteliti kembali.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengambil judul **“Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Nilai Perusahaan Yang Dimoderasi Oleh *Return On Equity* Dan Prudent Akuntansi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Tekstil dan *Garment* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010 – 2014”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka identifikasi masalah masalah dari penelitian ini adalah :

1. Konsentrasi kepemilikan bisa memicu terjadinya resiko ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas.
2. *Corporate governance* pada dasarnya menyangkut masalah siapa (*who*) yang seharusnya mengendalikan jalannya kegiatan korporasi dan mengapa (*why*) harus dilakukan pengendalian terhadap jalannya kegiatan korporasi.
3. Laba yang tidak menunjukkan informasi yang sebenarnya tentang kinerja manajemen dapat menyesatkan pihak pengguna laporan.
4. Lemahnya penerapan *good corporate governance* menyebabkan terjadinya beberapa kasus manipulasi akuntansi.
5. Deviden tidak dibagikan oleh perusahaan karena perusahaan merasa perlu untuk menginvestasikan kembali laba yang diperolehnya.
6. Sikap konservatif mengandung kesediaan mengorbankan sesuatu untuk mengurangi atau menghilangkan resiko terjelek dalam ketidak pastian.

7. Konsep dasar prudent akan menimbulkan diterapkannya perlakuan atau prinsip akuntansi yang didasarkan pada munculan yang dianggap kurang menguntungkan.
8. Semakin besar dan luas usaha suatu perusahaan, pemilik tidak bisa mengelola sendiri perusahaannya secara langsung sehingga memicu timbulnya masalah keagenan.

1.3. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini bertujuan agar lebih fokus dan tidak melebar dari masalah yang akan diteliti, diantaranya adalah :

1. Penelitian ini hanya menggunakan 5 tahun periode pengamatan yaitu untuk 2010 – 2014.
2. Perusahaan yang digunakan sebagai sampel untuk penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor tekstil dan garment yang terdaftar di BEI.
3. Variabel yang digunakan hanya kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris sebagai variabel independen, serta ROE dan prudent akuntansi sebagai variabel moderasi. Sedangkan variabel dependen yang di teliti adalah nilai perusahaan.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris yang dimoderasi ROE dan prudent akuntansi secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor tekstil dan garment yang terdaftar di BEI periode 2010-2014 ?

2. Apakah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris yang dimoderasi ROE dan prudent akuntansi secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor tekstil dan garment yang terdaftar di BEI periode 2010-2014 ?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian yang sudah ditentukan maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis apakah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris yang dimoderasi ROE dan prudent akuntansi secara parsial memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis apakah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris yang dimoderasi ROE dan prudent akuntansi secara simultan memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan memberikan manfaat kepada beberapa pihak antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa tambahan ilmu pengetahuan kepada penulis mengenai GCG pada perusahaan yang ada di Indonesia dan menjadi bahan untuk penulis untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya. Selain itu dapat memperkaya

konsep dan teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan serta memberikan informasi bagi rancangan penelitian berikutnya.

2. Manfaat untuk Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada perusahaan, khususnya mengenai *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan. Dan sebagai bahan referensi untuk pengambilan kebijakan oleh manajemen maupun investor

3. Manfaat untuk Regulasi

Yaitu BAPEPAM dan BEI, penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris akan efektivitas peraturan yang telah dikeluarkan mengenai mekanisme *corporate governance* agar lebih ditingkatkan penerapannya sehingga lebih efektif.

4. Manfaat untuk Akuntan

Diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance*, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan untuk seorang akuntan publik.